

**PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PENCAIRAN KREDIT MULTIGUNA FIKTIF
YANG TERJADI DI BANK JATIM**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh:

AULIA NUR ISLAMIAH
NIM : 2014411003

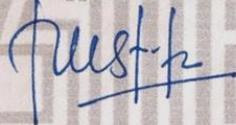
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Aulia Nur Islamiar
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 12 September 1996
N.I.M : 2014411003
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
J u d u l : Perlakuan Akuntansi pada Pencairan Kredit Multiguna Fiktif yang Terjadi di Bank Jatim

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 18 September 2017



(Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., MSA)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3,
Tanggal : 18 September 2017



(Putri Wulanditva, SE., M.Ak., CPSAK)

PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PENCAIRAN KREDIT MULTIGUNA FIKTIF YANG TERJADI DI BANK JATIM

Aulia Nur Islamiar
STIE Perbanas Surabaya
Email: auliaislamiar96@gmail.com

ABSTRACT

Bank is business entity that collects public funds of savings and distribute it in the credit or the other forms in order to improve the standard of living the society. The main function of banks is to collect, channel public funds, and intermediary traffic payments in this country. The types of banks are Central Banks, Commercial Banks, and Bank Pekreditan Rayat (BPR). In my research I will discuss about the Regional Government Bank in East Java, called Bank Jatim Branch Malang. Especially the problem happened in Bank Jatim two years ago is the disclosure of fictitious customers pretend as government employees (PNS). The purpose of my research is to find out how the fictitious customers entry in Bank Jatim, and to increase my insight as a researcher about credit funds in the bank especially in Bank Jatim. I used two method in my research, observation and interview. Observation from economic books, and especially about banking books. Interview I did with one of the credit officers at Bank Jatim branch Malang. The result of my research, fictitious customers can enter because at the time of disbursement of credit funds the bank did not check directly (on the spot) and the bank has not run the BKN system (Badan Kepegawaian Nasional) perfectly.

Keywords: *bank jatim, credit, fictitious customers*

PENDAHULUAN

Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan sutu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer atau manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

Pencatatan atau penjurnalan dalam akuntansi Jurnal adalah catatan permanen pertama (*book of original entry*) dari berbagai transaksi finansial yang tersusun secara sistematis dan kronologis (urutan waktu kejadian) dengan menyebutkan akun yang di Debet maupun yang di Kredit dengan jumlah dan keterangan yang ringkas serta jelas.

Kredit merupakan salah satu program bank mewujudkan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kredit Multiguna adalah kredit yang diberikan kepada pegawai negeri seperti, PNS, CPNS, anggota Polri, TNI, dan lain sebagainya, serta juga dapat

diberikan kepada pegawai swasta yang *bonafide*.

Beberapa faktor yang dapat menimbulkan permasalahan kredit, salah satunya ialah tidak adanya antisipasi kreditur bahwa debitur akan melakukan kecurangan. Sebagai contoh yakni timbulnya kredit fiktif. Penyebab munculnya kredit fiktif dapat terjadi karena faktor eksternal seperti iming-iming yang besar dari pihak terkait, dan faktor internal seperti kurangnya ketelitian dan sikap waspada serta pengawasan internal yang baik dalam pencairan dana kredit.

Bank Jatim Cabang Malang sebagai salah satu bank pemerintah yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit, turut andil dalam perbaikan sektor riil ekonomi Indonesia. Terjadinya kesalahan pencairan dana KUR fiktif di Bank Jatim Cabang Malang, yakni Kredit Multiguna, dan dari hasil pengauditan telah diduga terjadi kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpanan tersebut.

Berdasarkan latar belakang peneliti, dirasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Perlakuan Akuntansi pada Pencairan Kredit Multiguna Fiktif yang Terjadi di Bank Jatim Cabang Malang”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Prosedur pemberian Pinjaman Kredit Multiguna pada Bank Jatim Cabang Malang?
- 2) Bagaimana perlakuan pencatatan data forensik terhadap kredit multiguna fiktif yang terjadi di Bank Jatim Cabang Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Bank Jatim Cabang Malang

- 2) Untuk mengetahui jurnal atas pencatatan data secara forensik terhadap kredit multiguna fiktif yang terjadi di Bank Jatim Cabang Malang

- 3) Untuk mengetahui perlakuan jurnal kerugian pada kasus kredit multiguna fiktif

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi dikenal sebagai bahasa bisnis. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis.

Jurnal Akuntansi

Jurnal adalah catatan permanen pertama (*book of original entry*) dari berbagai transaksi finansial yang tersusun secara sistematis dan kronologis (urutan waktu kejadian) dengan menyebutkan akun di debet maupun di kredit yang jumlah dan keterangan ditulis secara ringkas serta jelas. Prinsip Jurnal dapat dipahami dari tabel berikut:

TABEL 2.1
PRINSIP JURNAL

Debit		Kredit	
Aset	++	Aset	--
Beban	++	Beban	--
Kewajiban	--	Kewajiban	++
Kekayaan bersih	--	Kekayaan bersih	++
Pendapatan	--	Pendapatan	++

Sumber: Akuntansi Keuangan Dasar 1 (2010:21)

Transaksi Keuangan

Transaksi adalah semua aktifitas kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, atau yang mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan.

Transaksi meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Transaksi yang terjadi akan dibukukan. Pembukuan tersebut dilakukan oleh seorang ahli pembukuan. Namun pembukuan berbeda dengan akuntansi. Proses akuntansi biasanya dilakukan oleh seorang akuntan. Akuntan akan membuat laporan dari transaksi keuangan yang telah tercatat yang ditulis oleh ahli pembukuan. Saat melakukan transaksi yang bersifat finansial, bukti-bukti transaksi harus lengkap agar benar-benar diakui kejadian atas transaksi tersebut.

Jurnal Transaksi

Jurnal adalah catatan permanen pertama (*book of original entry*) dari berbagai transaksi finansial yang tersusun secara sistematis dan kronologis (urutan waktu kejadian) dengan menyebutkan akun di debit maupun di kredit yang jumlah dan keterangan ditulis secara ringkas serta jelas.

Siklus Akuntansi

Sofyan Syafri Harahap (2013:16) dalam bukunya Teori Akuntansi bahwa “Proses akuntansi adalah proses

pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini

memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput keproses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.”

Tahap Pencatatan Jurnal meliputi:

1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi
2. Pencatatan dalam jurnal (buku harian)
3. Pemindahbukuan ke buku besar

Tahap Pengihtisaran meliputi:

1. Pembuatan neraca saldo (*trial balance*)
2. Jurnal penyesuaian
3. Neraca saldo disesuaikan
4. Perhitungan rugi laba dan neraca
5. Penyusunan laporan keuangan
6. Jurnal penutup
7. Pembuatan neraca saldo penutup
8. Jurnal pembalik.

Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan. Elemen-elemen laporan keuangan yang utama ada lima, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ketiga elemen laporan keuangan yang pertama (aset, kewajiban ekuitas) berada di laporan posisi keuangan (dikenal dengan nama "neraca"). Kedua elemen berikutnya (pendapatan dan beban) berada di laporan laba rugi (dikenal dengan nama

"laporan rugi laba"). Persamaan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Persamaan akuntansi dasar

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$$

2. Persamaan akuntansi ekstensi
Persamaan akuntansi ekstensi ada dua;
 - a. Persamaan akuntansi ekstensi perspektif sejarah

$$\text{Aset} + \text{Beban} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas} + \text{Penghasilan}$$

- b. Persamaan akuntansi ekstensi perspektif IFRS

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas} + (\text{Penghasilan} - \text{Beban})$$

Kredit

Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Terdapat hal-hal yang dijanjikan di awal pemberian kredit, antara lain:

1. Jangka waktu kredit
2. Suku bunga
3. Cara pembayaran
4. Agunan/jaminan kredit
5. Biaya administrasi
6. Asuransi jiwa dan tagihan

Jenis-Jenis Kredit yang diberikan

Jenis kredit yang diberikan oleh bank bervariasi misalnya kredit investasi, konsumsi, kredit produktif, kredit perumahan (KPR), kredit sindikasi, kredit kendaraan, dan lain sebagainya. Namun demikian secara umum jenis pemberian kredit dapat dilihat dari bentuk, jangka waktu, dan kegunaan kredit.

Jenis Kredit Menurut Bentuknya

- a. Kredit Rekening Koran
Dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian.

- b. Installment Loan
Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit *installment* angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit.

Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya

- a. Kredit Jangka Pendek
Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
- b. Kredit Jangka Menengah
Yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.
- c. Kredit Jangka Panjang
Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan, kredit kendaraan.

Jenis Kredit Menurut Kegunaannya

a. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.

b. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya.

c. Kredit Konsumsi

Yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*. Contoh: Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan sebagainya.

Bank Pemerintah Daerah

Bank Pemerintah Daerah adalah bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Fungsi Bank Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam melakukan usahanya, perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat. Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Asas Bank

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terdapat asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam pelayanan publik oleh aparat pemerintah, diantaranya:

- 1) Kepentingan umum: Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/ atau golongan.
- 2) Kepastian hukum: Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- 3) Kesamaan hak: Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Keseimbangan hak dan kewajiban: Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- 4) Keprofesionalan: Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- 5) Partisipatif: Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif: Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- 6) Keterbukaan: Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- 7) Akuntabilitas: Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan: Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- 9) Ketepatan waktu: Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

- 10) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan: Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Nama Perusahaan : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Alamat Perusahaan : Jl. Jaksa Agung Suprpto 26-28 Malang
Tanggal Berdiri : 17 Agustus 1916.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Visi dari Bank Jatim adalah menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional. Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional.

Misi dari Bank Jatim adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bank Jatim.

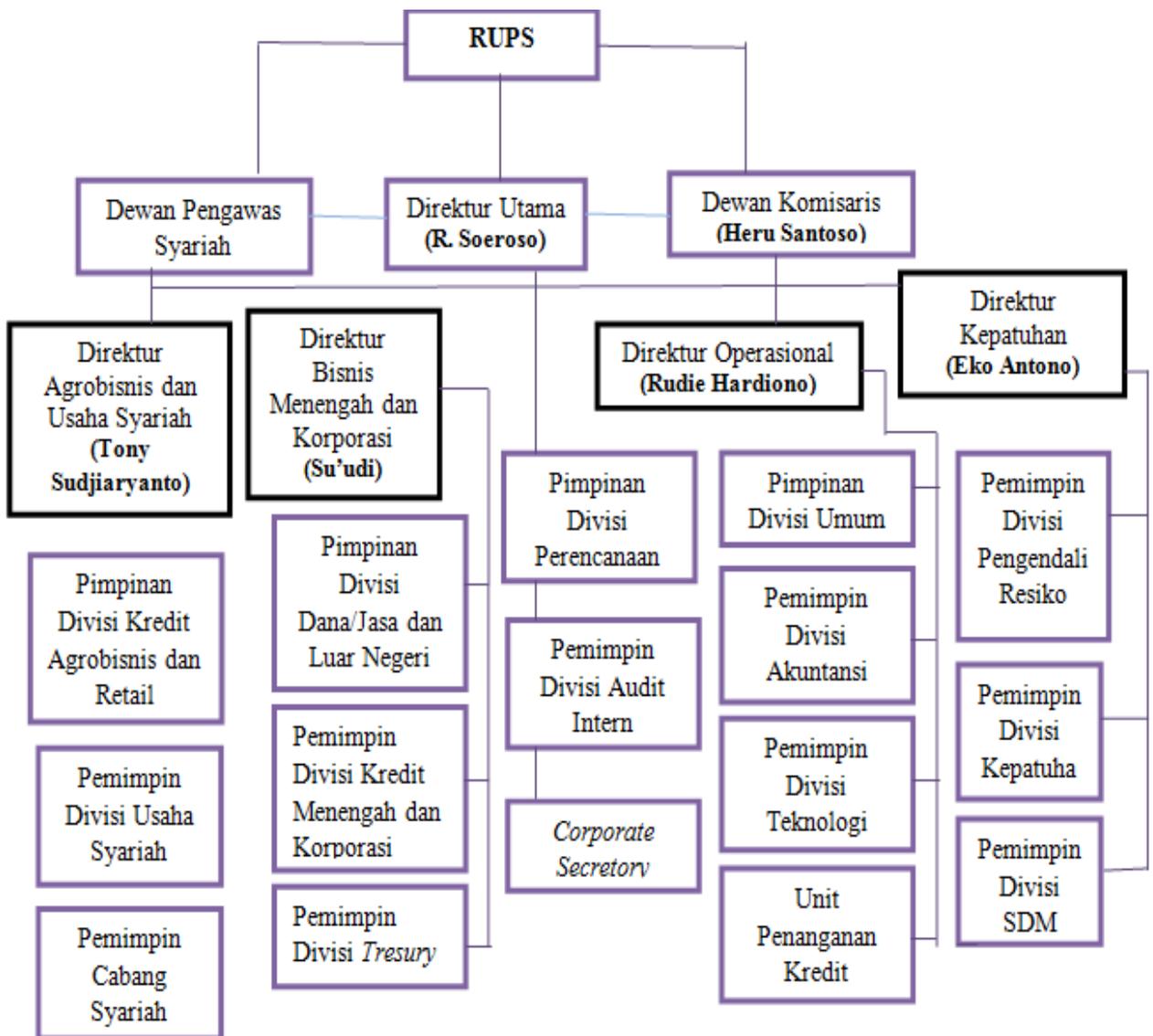
Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-

0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan

pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Struktur organisasi Bank Jatim dapat dilihat sebagai berikut;

GAMBAR 3.1
STRUKTUR ORGANISASI BANK JATIM



Sumber : www.bankjatim.co.id

PEMBAHASAN

Pengetian Kredit Pegawai Negeri atau Multiguna

Kredit pegawai negeri atau multiguna merupakan kredit yang diberikan kepada PNS, CPNS, calon pegawai BUMN, dan BUMD, anggota TNI, POLRI, Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan Swasta yang *bonafide*, pensiunan, dan purnawirawan.

Pihak-pihak yang Terkait dalam Pencairan Kredit Multiguna

Dalam prosedur pemberian kredit multiguna, di Bank Jatim Cabang Malang, ada beberapa pihak yang terkait, yaitu:

- a. Debitur
Debitur merupakan pihak yang akan mengajukan pinjaman ke bank yang akan dibayar kembali pada masa mendatang sesuai dengan perjanjian
- b. Petugas kredit
Petugas kredit merupakan pihak yang memproses data-data atau dokumen dari awal debitur mengajukan permohonan kredit.
- c. *Loan Committee* atau kredit komite yang melakukan rapat untuk persetujuan kredit debitur dan analisa penentuan plafon untuk debitur
- d. Asuransi untuk mengantisipasi adanya resiko, maka untuk setiap pemberian kredit harus dilakukan pertanggungan asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi bangunan kebakaran kepada perusahaan yang bekerjasama dengan bank.
- e. Debitur
Debitur merupakan pihak yang akan mengajukan pinjaman ke bank yang akan dibayar kembali pada masa mendatang sesuai dengan perjanjian
- f. Petugas kredit
Petugas kredit merupakan pihak yang memproses data-data atau dokumen dari awal debitur mengajukan permohonan kredit.
- g. *Loan committee*
Loan committee atau komite kredit merupakan pihak yang melakukan rapat

untuk persetujuan kredit debitur dan analisa penentuan plafon untuk debitur.

h. Asuransi

Untuk mengantisipasi adanya resiko, maka untuk setiap pemberian kredit, harus dilakukan pertanggungan asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi bangunan kebakaran kepada perusahaan yang bekerjasama dengan bank.

Ketentuan kredit pegawai negeri

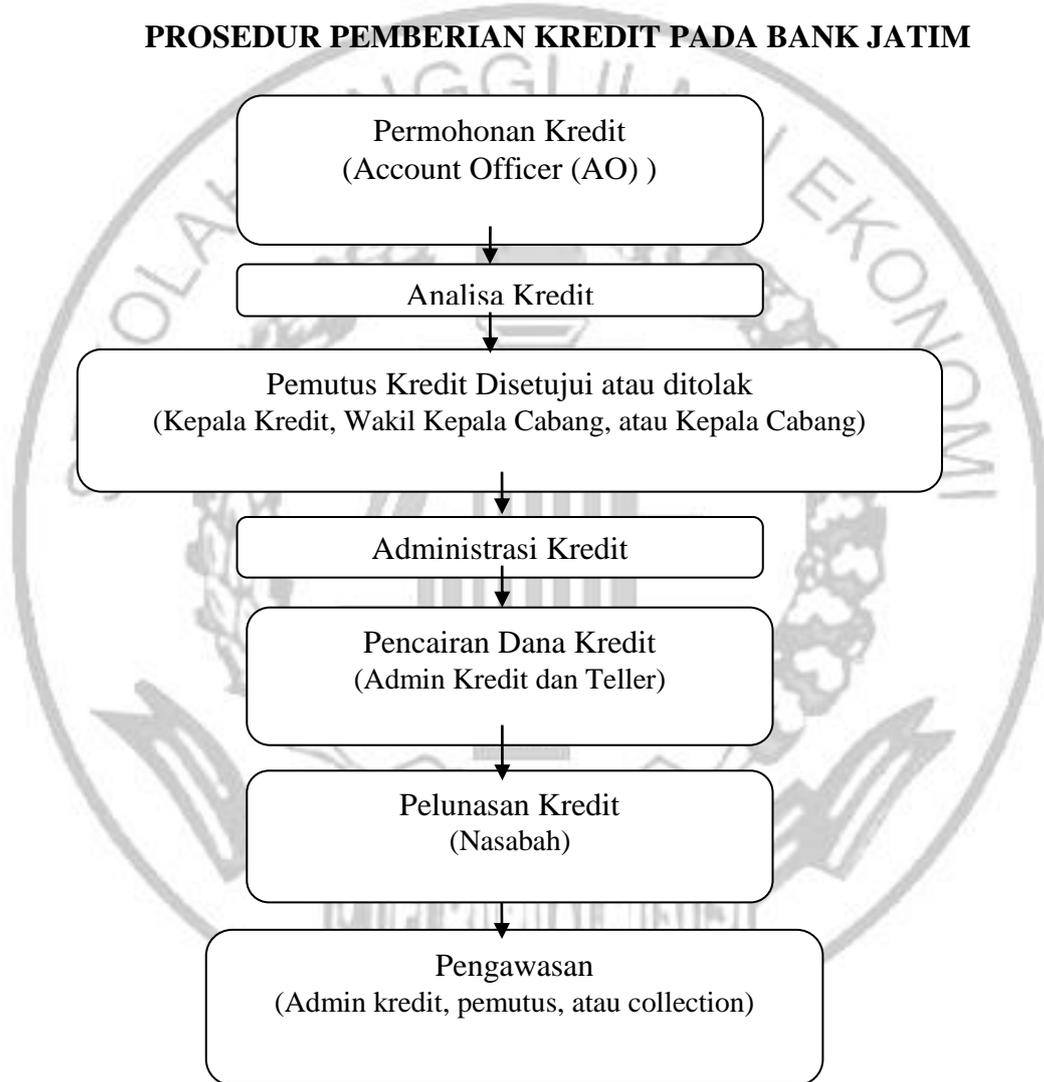
Bank Jatim cabang Malang memberlakukan beberapa ketentuan sebelum kredit diberikan pada calon debitur. Ketentuan wajib yang harus dipenuhi dan ditaati oleh calon debitur karena merupakan salah satu syarat dari pengajuan Bank Jatim cabang Malang. Adapun ketentuan umum kredit Multiguna PNS di Bank Jatim Cabang Malang ialah:

1. Plafond
Bila pegawai negeri mengajukan kredit maka plafond yang ditentukan adalah 80% dari penghasilan
2. Sasaran sektor usaha yang dibiayai ialah seluruh sector ekonomi konsumtif
3. Suku bunga
Sesuai tingkat suku bunga yang berlaku saat realisasi kredit, satu sampai dengan lima tahun 16.7 % pertahun anuitas dan enam sampai sepuluh tahun 16.3% pertahun anuitas
4. Jangka waktu
 - a. PNS, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD yang pembayaran gaji melalui Bank Jatim maksimal sepuluh tahun.
 - b. PNS, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD yang pembayaran gaji tidak melalui Bank Jatim maksimal delapan tahun.
 - c. Anggota TNI, Anggota POLRI yang pembayaran gaji melalui ataupun tidak melalui Bank Jatim maksimal delapan tahun.
 - d. Pegawai swasta, Yayasan, Koperasi, yang pembayaran gaji melalui Bank Jatim maksimal delapan tahun.

- e. Pegawai Swasta, Yayasan, Koperasi yang pembayaran gaji tidak melalui Bank Jatim maksimal lima tahun.
- f. Anggota Legislatif yang pembayaran gaji melalui Bank Jatim maksimal lima tahun atau maksimal sisa masa bakti.
- g. Purnawirawan, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, BUMN, BUMD yang
- pembayaran gaji melalui Bank Jatim maksimal sepuluh tahun dan usia maksimal tujuh puluh tahun pada saat kredit jatuh tempo.
- h. Calon pegawai atau CPNS, BUMN, BUMD atau yang pembayaran gaji melalui Bank Jatim jangka waktu maksimal lima tahun.

GAMBAR 4.1

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA BANK JATIM



Sumber: Lampiran 1, diolah

Prosedur Pemberian Kredit pada Bank Jatim

Prosedur Pemberian kredit pada Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur datang ke kantor Bank Jatim Cabang Malang menemui Account Officer (AO) pemasaran untuk mengajukan permohonan kredit. Bagian AO seperti *loan service*, *loan admin*, atau petugas *survey* (survey usaha, survey tempat kerja)
2. Debitur mengisi form pengajuan kredit. Setelah diisi dan dilengkapi persyaratannya, bagian AO memberikan data-data calon debitur kepada Analis Kredit
3. Analis Kredit menganalisa dan mengevaluasi data calon debitur untuk diberikan kepada penyelia. Analis kredit melakukan klarifikasi data seperti jumlah penghasilan calon debitur, dan menganalisa hasil survey.
4. *Credit Committee* I mengadakan rapat dengan *Credit Committee* II, *Credit Committee* III, dan Analis kredit, apakah layak diberikan pinjaman
5. Jika disetujui, maka hasil rapat memberikan rekomendasi untuk pemberian kredit kepada calon debitur. Rekomendasi diberikan kepada pemutus kredit, bisa ke kepala kredit jika pengajuan kredit < Rp 250.000.000 dan ke wakil atau kepala cabang jika pengajuan Rp >250.000.000.
6. Bagian Pemasaran atau AO menghubungi calon debitur untuk datang ke kantor mengisi perjanjian dan pencairan pinjaman kredit yang diajukan. Pencairan dana kredit dilakukan oleh admin kredit (secara sistem) dan dilakukan oleh teller (secara fisik).

Pengawasan dilakukan oleh bank saat proses pelunasan kredit. Pengawasan dalam pelunasan kredit difokuskan pada

hal-hal intern dan ekstern yang akan menjadi ancaman. Pengawasan fisik akan dilakukan dengan langsung ke tempat usaha nasabah. Pengawasan Audit juga dilakukan untuk pengecekan kembali atas pekerjaan yang telah dikerjakan petugas sebelumnya. Pengawasan audit lainnya ialah *Independence Balancing* yang merupakan penyeimbang antara saldo-saldo rekening selama pencatatan, pelaporan transaksi-transaksi perkreditan.

Perhitungan dan Perlakuan Jurnal pada Kredit Multiguna

Pembayaran kembali kredit sebagaimana yang telah dituangkan di dalam perjanjian kredit yaitu pembayaran kembali angsuran diperhitungkan berdasarkan perhitungan *Anuitas Rate* yang berdasarkan atas perhitungan bunga secara menurun dengan angsuran tetap/tidak berubah sesuai jangka waktu kredit dan nominal pokok pinjamannya atau merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Ada dua cara untuk menentukan besar plafond, jangka waktu kredit dan angsuran. Cara pertama yaitu $80\% \times$ Gaji pokok Pegawai Negeri. Hasil perhitungan tersebut bias dilihat dari tabel perhitungan angsuran bulanan kredit PNS, jadi di bagian kiri tabel ada plafond, dan dibagian atas tabel ada jangka waktu kredit. Sehingga debitur bisa memilih plafond, jangka waktu, dan besarnya angsuran yang akan dibayar oleh debitur. Besarnya angsuran dipengaruhi oleh jumlah kredit yang diajukan, tingkat bunga dan jangka waktu, dengan demikian apabila sudah diketahui tingkat suku bunga anuitasnya, maka menggunakan 40 is:

$$APB = P \times \frac{i}{1-(i+1)^{-n}}$$

Keterangan:

APB : Angsuran pokok dan bunga per bulan

P : Maksimum kredit yang dapat diberikan
 I: Suku bunga anuitas per bulan
 n : Jangka waktu kredit (dalam bulan)

$$\text{Angsuran} = \frac{426.560}{0.5482}$$

Contoh perhitungan untuk pegawai negeri,
 calon pegawai negeri dan pensiunan

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \text{Rp } 778.110 - \text{Rp } 426.666 \\ \text{Angsuran} &= \text{Rp } 351.444 \end{aligned}$$

Maksimal angsuran tiap bulan :
 80% x 1.000.000 = 800.000
 Suku bunga (i) :
 16% p.a/Anuitas Floating Rate
 Jangka waktu (n) :
 lima tahun (enam puluh bulan)
 Maka perhitungannya =

Jurnal perlakuan terhadap kredit multiguna:

$$\begin{aligned} \text{APB} &= P \times \frac{i}{1-(i+1)^{-n}} \\ 800.000 &= P \times \frac{16\% / 12}{1-(16\%/12+1)^{-60}} \\ 800.000 &= P \times \frac{0.01333}{1-(0.01333 + 1)^{-60}} \\ 800.000 &= P \times 0.024316 \\ P &= \frac{800.000}{0.024316} \\ P &= \text{Rp } 32.900.148,05 \end{aligned}$$

a. Jurnal pada saat awal perkreditan
 D. Pinjaman yang diberikan
 Rp 33.000.000
 K. Tabungan Rp 33.000.000

Maka maksimal kredit adalah Rp
 33.000.000,00 dengan jangka waktu 10
 tahun.

b. Jurnal pada saat pencairan 42^{1a}
 D. Pinjaman yang diberi
 Rp 33.000.000
 K. Tabungan Rp 33.000.000

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \frac{\text{Pokok} \times \text{rate}}{1 - \frac{1}{(1+\text{rate})^n}} \\ \text{Angsuran} &= \frac{32.000.000 \times 1,333\%}{1 - \frac{1}{(1+0,01333)^{60}}} \end{aligned}$$

c. Jurnal pada saat pelunasan dana
 sebelum jatuh tempo
 D. Tabungan Rp 25.000
 K. Beban Admin Rp 25.000

d. Jurnal beban asuransi pada saat
 pencairan dana
 Beban asuransi 0.4% x Rp
 33.000.000 = Rp 132.000
 D. Tabungan Rp 132.000
 K. Beban Asuransi Rp 132.000

e. Jurnal pada saat penerimaan bunga
 dari debitur
 Beban bunga 16% x Rp 351.444 =
 Rp 56.231
 D. Tabungan / Kas Rp 128.000
 K. Pendapatan bunga kredit yang
 akan diterima Rp 128.000

Berikut data total kredit dan total kerugian piutang yang dialami oleh bank:

TABEL 4.1
RANGKUMAN OUTSTANDING PINJAMAN

Total Nasabah	Jenis Kredit	Plafond (Pencairan Kredit)	Outstanding Pinjaman
126 debitur	Kredit Multiguna	Rp. 12.225.000.000	9.527.530.715

Sumber: Koran Sindo 2016, diolah

Diketahui:
 Kredit yang dicairkan =
 Rp 12.225.000.000

Kerugian piutang =
 Rp 9.527.530.715
 Suku bunga = 16%
 Denda = 5%

Jurnal pada saat sebelum terjadi kredit macet

D. Beban penyisihan kerugian pinjaman
Rp 9.527.530.715

K. Penyisihan kerugian pinjaman
Rp 9.527.530.715

Jurnal pada saat debitur tidak membayar angsuran

D.Tabungan / Kas Rp 14.792.250.000

K. Pinjaman yang diberikan / Plafon
Rp 12.225.000.000

K. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima Rp 1.956.000.000

K. Pendapatan denda Rp 611.250.000

Dengan perhitungan:

Pendapatan bunga

= 16% x Rp 12.225.000.000

= Rp 1.956.000.000

Pendapatan denda =

5% x Rp 12.225.000.000

= Rp 611.250.000

KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai pemberian kredit pada bank serta perlakuan akuntansinya di beberapa kegiatan dalam kredit.

Tujuan salah satu bank yang memiliki salah satu peran sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara pemberian kredit. Pencairan dana kredit memiliki laporan keuangan yang terkait pinjaman pemberian kredit. Akuntansi adalah suatu aktivitas mengidentifikasi, mengukur, mengkalsifikasi, dan mengikhtisar kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan yang dapat diambil dari peneliti mengenai “Perlakuan Akuntansi pada Pencairan Kredit Multiguna Fiktif

yang Terjadi di Bank Jatim Cabang Malang” ialah:

1. Kredit merupakan aktiva produktif (*earning assets*) dalam bank. Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif.

Bank Jatim telah menerapkan akuntansi aktiva produktif yang telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang penilaian kualitas asset umum, namun bank kurang menerapkan pengawasan dalam pemberian kredit multigunanya sehingga terjadi *outstanding* pinjaman.

Saran

Saran dari penelitian yang telah dilakukan di Bank Jatim yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk bank kedepannya adalah:

1. Diharapkan bank Jatim dapat mempertahankan pencatatan akuntansi yang telah dilakukan, karena telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
2. Bank diharapkan dapat berhati-hati dalam pemberian kredit dan lebih meningkatkan pengawasan internal terutama dalam proses analisa kreditnya

Implikasi

Berdasarkan saran yang telah disampaikan peneliti, maka Bank Jatim Cabang Malang diharapkan dapat menerapkan saran yang telah diberikan:

1. Bank Jatim Cabang Malang akan terus mempertahankan cara pencatatan yang telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
2. Bank Jatim Cabang Malang melakukan pengawasan lebih kuat lagi dan memperbaiki sistem pengendalian kreditnya

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Lukman Dendawijaya. 2011. *Manajemen Perbankan*

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan*

Alam S. 2013. *Ekonomi untuk SMA dan MA*.

Handoko, T.H.(2013) *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE.

Herijanto, H. (2013) *Selamatkan Perbankan Demi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Mizan Publika.

H.Veithzal Rivai. 2013. *Buku Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Edisi 1. Cetakan Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers

Mohammad Irianto. 2014. *Prosedur Audit Operasional Bank*

Theodorus. 2014. *Audit Berbasis ISA*

Febri Jaya. 2016. *Masalah Terkait Kredit Perbankan*

Koran Sindo (Surabaya). 9 Juni 2015.

Yusuf, Personal Interview di Bank Jatim Cabang Malang. 6 Juni 2017.

Muhammad Ilham. 2015. "Prosedur Pemberian Kredit Multiguna PNS pada Bank Jatim Capem Waru". STIE Perbanas Surabaya

